

# **BULETIN DEMI PEMILU**



# **Susunan Redaksi**

**Pengarah :**

Moh. Amin,  
Aang Kunaifi,  
Nur Elya Anggraini,  
Purnomo Satrio P,  
Ikhwanudin Alfianto,  
Eka Rahmawati.

**Penanggung jawab :**

Sapni Syahril

**Tim Penulis :**

Ilham Bagus,  
Abdul Hakam,  
Alim Mustofa,  
Buyung Pambudi,  
Anas Muslimin,  
Juwaini,  
Ahmad Mustain,  
Suyitno Arman,  
Taufiqil Aziz,

**Desain Grafis :**

Amryzal Perdana

**Fotografer :**

Ilham Bagus Priminanda,

Krisna Andika T

**Sirkulasi :** Prajna Eka

**Redaktur :** Nur Elya Anggraini



# PESTA DEMOKRASI 2024 ITU TELAH DIMULAI

## Oleh : Ahmad Mustain

TEPAT 20 bulan sebelum hari-H pemungutan suara, tahapan Pemilu 2024 dimulai. Hitungannya bertepatan Selasa 14 Juni 2022. Penyelenggara pemilu baik itu KPU dan Bawaslu menggelar penanda dimulainya tahapan pemilu serentak 2024 tersebut dari level pusat hingga kabupaten/kota.

Tahapan Pemilu 2024 resmi dimulai dilandasi Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2022. Setelah dirancang dan dikonsultasikan pada Komisi II DPR RI dan dibahas bersama pemerintah, peraturan tersebut disahkan. Praktis, semua pihak kini mulai bersinergi menyukseskan pemilu serentak tersebut.

Pihak KPU memulai Pemilu 2024 dengan acara Peluncuran Tahapan Pemilu tahun 2024. Acara yang digelar 14 Juni 2022 malam ditandai dengan penekanan sirine. Gelaran acara difokuskan di KPU RI, sedangkan penyelenggara di bawahnya mengikuti secara hybrid. Bawaslu pun hadir bersama stakeholder lainnya.

Sebelum itu, pada pagi harinya, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu Kabupaten/Kota mengelar Apel Siaga Pengawasan Pemilu. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja memimpin dari kantor Bawaslu RI. Pimpinan dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota se-Indonesia mengikuti secara daring. Sirine, kentongan hingga tetabuhan lainnya dibunyikan.

“Kami Bawaslu se-Provinsi Jawa Timur siap mengawasi bersama rakyat dan mengawal keadilan pemilu,” serentak dan serempak kata-kata ini diungkapkan oleh Bawaslu Jatim

Hal itu ditangapi dengan penuh semangat oleh peserta apel. “salam Awas” ujar sekretariatan Bawaslu Jawa Timur yang hadir. Apel serupa juga terlihat di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Sepekan sebelumnya, Bawaslu RI hingga Kabupaten/kota juga telah serentak membuka meja layanan Pemantau Pemilu. Hal tersebut menjadi trend baru, Bawaslu mengajak sejak awal keterlibatan masyarakat bersama-sama mengawasi pemilu. Praktis para pemantau pemilu mulai mendaftarkan diri. Bahkan beberapa pemantau regional dan lokal juga mendatangi Bawaslu Provinsi Jatim serta Bawaslu Kabupaten/kota di Jawa Timur.

Kini jajaran Bawaslu telah diminta menyiapkan fisik, mental dan seluruh energinya mengawal jalannya Pemilu 2024. Beratnya tahapan Pemilu 2024 menjadi fokus dan perhatian serius pimpinan Bawaslu RI. Segala tantangan pengawasan Pemilu 2024 diharapkan mampu sejak dini mengantisipasi segala kendala yang akan dihadapi.

Sektor krusial yang tengah dinanti peserta pemilu dan masyarakat adalah produk hukum lainnya yang menjadi aturan main pesta demokrasi terbesar tersebut. Penetapan jadwal secara terperinci juga menjadi hal menarik untuk dinantikan.

Pesta Demokrasi  
2024



# **PERUBAHAN NAMA DIVISI DAN PENDEKATAN BARU PENGAWASAN PEMILU 2024**

**Oleh : Alim Mustofa**

Tanggal 19 April 2022 lalu yang bertepatan dengan bulan Ramadhan, publik menunggu hasil rapat pleno tentang penetapan ketua dan penanggung jawab divisi Bawaslu 2022-2027. Hingga akhirnya lewat konferensi pers jam 18.00, Rahmad Bagja membacakan hasil rapat pleno.

“Rapat Pleno Anggota Bawaslu menghasilkan keputusan secara aklamasi yang menetapkan Rahmad Bagja sebagai ketua Bawaslu,” ungkapnya.

Bagja meneruskan bahwa rapat pleno merujuk pada Undang-Undang 07 tahun 2027 “Bawa dalam Pasal 92 Ayat 8 Ketua Bawaslu dipilih dan oleh Anggota Bawaslu,” jelasnya. Setelah Bagja, konferensi pers tersebut dilanjutkan dengan pemaparan dari Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty.

“Untuk menjalankan perintah Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 tentang tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu kami akan membacakan hasil rapat pleno Anggota Bawaslu tentang Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Bawaslu,” ungkapnya.

Kemudian Lolly membacakan dengan terang hasil pleno terbut, yakni:

1. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan Pelatihan (Koordinator Divisi: Herwyn Jefler Hiela Malonda. Wakil Koordinator Divisi: Lolly Suhenty)



2. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (Koordinator Divisi: Totok Hariyono. Wakil Koordinator Divisi: Puadi)
3. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (Koordinator Divisi: Lolly Suhenty. Wakil Koordinator Divisi: Totok Hariyono)
4. Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi (Koordinator Divisi: Puadi. Wakil Koordinator Divisi: Herwyn Jefler Hiela Malonda).

Sebagai informasi, pada periode 2017-2022, divisi di Bawaslu antara lain, Pengawasan dan hubungan antar Lembaga, Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, Sumberdaya Manusia dan Organisasi dan Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi.

# TIM SELEKSI DORONG KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN SELEKTIF DALAM INTEGRITAS

Oleh : Anas Muslimin



Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi mulai bergulir. Tim seleksi yang ditunjuk oleh Bawaslu Republik Indonesia sudah mengumumkan jadwal tahapan. Pihaknya sangat selektif terhadap integritas diri calon pendaftar guna menghasilkan pengawas pemilu yang berkualitas. Serta mendorong aktifis perempuan ikut berpartisipasi.

"Kami tim seleksi mendorong agar para aktifis perempuan di Jatim ikut berpartisipasi pada seleksi Bawaslu Provinsi Jatim ini. Setidaknya kuota 30 persen dapat dipenuhi. Untuk itu, kita sosialisasi di Kota Batu dan Bangkalan", jelas Dr. Sasongko Budi Susetyo. Merujuk pada pedoman seleksi, dia juga

menyampaikan agar calon pendaftar memperhatikan dan memperdalam kompetensi di bidang kepemiluan. Mulai dari strategi pengawasan pemilu, sistem hukum, sistem politik dan penguasaan terhadap perundang-undangan kepemiluan. Selain itu juga memperhatikan integritas diri, komitmen dan motivasi.

"Selain kompeten dalam bidang kepemiluan dan perundang-undangan, integritas calon pendaftar betul-betul kami perhatikan", tegasnya.

Tim seleksi yang beranggotakan lima orang tersebut sudah mengumumkan melalui website milik Bawaslu Provinsi Jawa Timur

sejak 14 Juni 2022 di [www.jatim.bawaslu.go.id](http://www.jatim.bawaslu.go.id). Termasuk dokumen pendaftaran yang terdapat beberapa lampiran juga sudah tersedia dan mudah diunduh.

"Semua proses seleksi dibuat mudah. Semua bisa mengakses sehingga seleksi ini terbuka untuk umum. Tentu harus mengetahui syarat dan ketentuannya", jelas Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, M.Si, Sekretaris Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Dalam pengumuman tersebut memuat 18 persyaratan yang harus diperhatikan lengkap beberapa formulir yang harus dilengkapi. Penerimaan pendaftaran dimulai tanggal 22 - 30 Juni 2022. Selanjutnya, dokumen atau berkas hardcopy pendaftaran bisa dikirim langsung di sekretariat pendaftaran atau dikirim melalui pos kilat, sedangkan softcopy dikirim melalui email.

"Selain persyaratan dokumen pendaftaran, materi-materi untuk tes tertulis, tes psikologi, tes kesehatan serta tes wawancara juga harus dipersiapkan agar hasilnya bisa maksimal", pungkasnya.

“

Semua proses seleksi dibuat mudah.  
Semua bisa mengakses sehingga seleksi  
ini terbuka untuk umum.  
Tentu harus mengetahui  
syarat dan ketentuannya

”

- Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, M.Si -  
Timsel -



## BERAPA PARTAI POLITIK IKUT PEMILU 2024

### Oleh : Suyitno Arman

Berapa Partai Politik (Parpol) yang akan bisa mengikuti Pemilu tahun 2024? Rasanya banyak orang yang penasaran, namun tidak bisa dijawab sekarang. Kepastian itu ditunggu-tunggu, bukan saja oleh publik sebagai calon pemilih, tetapi juga dari parpol itu sendiri. Syarat untuk bisa menjadi peserta pemilu tidak mudah. Parpol harus memenuhi seluruh syarat dan ketentuan perundang-undangan.

Saat ini parpol banyak, bahkan sangat banyak. Jumlahnya puluhan, mungkin bisa saja mendekati seratusan jika dihitung baik yang sudah berbadan hukum maupun belum berbadan hukum. Padahal hanya parpol berbadan hukum (BH) yang bisa mendaftar pemilu. Untuk memperoleh status BH, parpol harus didaftarkan di Kemenkum dan HAM (UU Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 3).

Tahap berikutnya adalah mendaftar ke KPU sesuai tahapan dan jadwal waktu yang ditetapkan. Persyaratannya banyak: punya kepengurusan di seluruh provinsi, punya 75% kepengurusan kabupaten/kota di provinsi, punya 50% kepengurusan kecamatan di kabupaten/kota, punya 30% pengurus perempuan di tingkat pusat, punya anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau 1/1000 orang dari jumlah penduduk kabupaten/kota, punya kantor tetap untuk kepengurusan di tingkat pusat hingga kabupaten/kota, mengajukan nama-lambang-tanda gambar parpol, serta menyerahkan nomor rekening

dana kampanye atas nama parpol (UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2)).

#### Verifikasi Oleh KPU

Undang-Undang pemilu mengatur bahwa parpol peserta pemilu adalah parpol yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.(UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (1)). Verifikasi ada 2 macam: verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Lantas apakah semua parpol harus menjalani 2 tahapan verifikasi itu? Mengingat ada parpol yang telah ikut pemilu 2019 dan punya kursi di parlemen (memenuhi ambang batas/parliamentary threshold). Ada parpol peserta Pemilu 2019 tapi tidak punya kursi di parlemen. Dan ada parpol baru yang sama sekali belum pernah ikut menjadi peserta pemilu 2019.

Terhadap persoalan itu, Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 akan menjadi rujukan. MK mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat atas frasa "Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU" pada Pasal 173 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 tersebut.

Kurang lebih dapat dimaknai sebagai berikut:



- (1) Parpol peserta Pemilu 2019 dan lolos ambang batas parlemen (punya kursi DPR-RI), diverifikasi secara administrasi namun tidak perlu verifikasi secara faktual;
- (2) Parpol peserta Pemilu 2019 namun tidak lolos ambang batas parlemen (tidak punya kursi DPR-RI, punya/tidak punya kursi DPRD Provinsi, punya/tidak punya kursi DPRD kabupaten/kota), diverifikasi administrasi dan faktual;
- (3) Parpol baru (yang artinya) bukan peserta Pemilu 2019, diverifikasi administrasi dan faktual.

### **Ayo Awasi Bersama**

UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93 memberikan tugas kepada Bawaslu untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk tahapan penetapan peserta pemilu. Pada saat bersamaan, publik diharapkan bisa berpartisipasi dalam mengawasi

Merujuk Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, jadwal pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu sudah akan dimulai Tanggal 29 Juli 2022. Dan penetapanya akan dilakukan Tanggal 14 Desember 2022. Waktunya sudah semakin dekat. Ada beberapa catatan titik rawan yang bisa kita jadikan obyek atau fokus pengawasan, karena bisa saja memunculkan potensi sengketa maupun pelanggaran. Baik dalam tahapan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual.

Pertama, potensi keanggotaan ganda. Kegandaan ini bisa saja terjadi dalam satu partai, bisa juga ganda antar partai. Ganda dalam satu partai manakala seseorang tercantum menjadi anggota suatu partai politik,

tetapi namanya muncul lebih dari satu kali atau berkali-kali. Sedangkan ganda antar partai, manakala seseorang menjadi anggota partai tertentu, namun namanya juga tercantum di partailain.

Kedua, keanggotaan parpol yang berstatus TNI/POLRI dan ASN. Perundang-undangan tidak memperbolehkan anggota TNI, POLRI, dan ASN menjadi anggota partai politik.

Ketiga, keanggotaan parpol melibatkan penduduk belum berusia 17 tahun dan belum pernah kawin pada saat pendaftaran parpol.

Keempat, verifikasi faktual kepengurusan partai politik. Beberapa potensi titik rawan bisa muncul misalnya terkait dengan konflik kepengurusan, kepengurusan ganda, pemenuhan keterwakilan gender, status dan kedudukan kantor, dan sebagainya.

Kelima, problem lain yang bersifat teknis administratif kadang juga bisa muncul dan perlu diwaspadai/diantispasi, misal penggunaan perangkat maya aplikasi Sipol dalam pendaftaran partai politik. KPU akan membuka akses Sipol kepada partai politik, idealnya parpol wajib melakukan entry data secara teliti, cermat, dan sesuai prosedur. Sebaliknya system juga harus bisa diakses secara mudah, lancar, tidak ngadat atau tidak ada kendala. Unsur pengawas juga harus diberikan akses kontrol yang layak dan memadahi untuk melakukan pencegahan maupun penindakan.

Pada tataran pelaksanaan di lapang, titik kerawanan tadi bisa jadi lebih sedikit atau justru lebih banyak dan rumit. Namun dengan tekad kuat dan integritas jajaran Bawaslu, ditopang dengan pengawasan partisipatif diyakini bahwa tahapan ini dapat dilalui secara demokratis.

## **DARI ARISAN KAJIAN HINGGA DIBUKUKN**

**Oleh : Ilham Bagus**

Awalnya hanya arisan, kajian dan akhirnya dibukukan. Ya, 24 Parapuan se-Jatim telah menulis dan menganalisis 12 cerita pendek yang akhirnya dibukukan. Anggota Bawaslu Jatim, Nur Elya Anggraini mengungkapkan perlunya pendekatan dan inovasi baru dalam menyampaikan pesan pengawasan.

"Satu sisi agar pengawas pemilu memiliki banyak pendekatan dan bisa memberikan variasi menu, sisi lainnya agar publik bisa tertarik dan berpartisipasi," ungkapnya

Dari 12 cerpen tersebut, Menurut Ely 24 Parapuan se-Jatim telah menganalisa dan memberikan konteks dalam sudut pandang perempuan dan demokrasi.

"12 cerita lalu lalu dihidupkan dengan analisa dan konteks yang lebih baru dan segar untuk menjawab soal-soal demokrasi dan

Ely berharap dengan buku tersebut bisa membuka cara pandang publik.

"Harapannya tentu untuk meningkatkan kesadaran publik. Selebihnya adalah memunculkan daya kreasi baru untuk mengawasi. Semoga juga mampu meningkatkan peran perempuan dalam pengawasan partisipatif" pungkasnya

“

Satu sisi agar pengawas pemilu memiliki banyak pendekatan dan bisa memberikan variasi menu, sisi lainnya agar publik bisa tertarik dan berpartisipasi

”

- Nur Elya Angrayeni -  
Anggota Bawaslu Jawa Timur

### **Arisan**



### **Pembukuan**



## **BAWASLU JATIM BEKALI PENGAWAS TEKNIK MENYUSUN KAJIAN REKOMENDASI DAN PUTUSAN**

*Oleh : Abdul Hakam*

"Fiat justitia ruat coelum", keadilan harus tetap ditegakkan walaupun langit runtuh. Idiom ini sejalan dengan semboyan Bawaslu, 'Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu'.

Dengan tahapan Pemilu Serentak 2024 yang diluncurkan pada 14 Juni 2022 sangat perlu peningkatan kapasitas bagi jajaran pengawas dan sekretariat Bawaslu. Salah satunya dalam menyusun kajian, rekomendasi, dan putusan.

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Purnomo Satrio Pringgodigdo, saat membuka Diskusi tentang Penyusunan Kajian, Rekomendasi dan Putusan dalam rangka pemilihan umum serentak Tahun 2024 di Kantor Bawaslu Ngawi, Rabu (25/6/2022), menegaskan bahwa menyongsong Pemilu dan Pilkada 2024 kajian tentang penyusunan rekomendasi dan putusan memang penting dilakukan.

"Perlu diperhatikan, bahwa rekomendasi dan putusan itu menjadi objek diskusi publik setelah menjadi keputusan hukum. Sementara hari ini kita perlu diskusi untuk kesiapan pengawas pemilu menyongsong tahapan yang sebentar lagi akan dilakukan," kata Purnomo.

## **BERITA HDI**



Dalam Diskusi tentang Penyusunan Kajian, Rekomendasi dan Putusan dalam rangka pemilihan umum serentak Tahun 2024 di Kantor Bawaslu Ngawi, menghadirkan narasumber dari SSP Law Firm Sidoarjo Sri Sugeng Pujatmiko yang juga mantan anggota Bawaslu Jawa Timur periode 2012 – 2017. Diskusi yang dimoderatori Kordiv Hukum Humas dan Data Informasi Bawaslu Ngawi Chairul Anam, ini diikuti ratusan peserta tidak hanya dari Jawa Timur namun dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Sri Sugeng paparkan tentang teknik-teknik dalam penyusunan kajian, rekomendasi dan putusan di dalam menanganidiugaansuatu pelanggaran. "Dalam menyusun kajian, rekomendasi dan putusan teman-teman pengawas pemilu harus

cermat, teliti, dan penerapan pasal yang tepat," kata Sri Sugeng.

Slide show 70 halaman yang ditampilkan, dipresentasikan secara ringkas dan padat sehingga mudah dipahami oleh para peserta. Dimulai dari penjelasan mengenai penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dan laporan, jangka waktu penanganan pelanggaran yang sangat terbatas baik pada Pemilu maupun Pemilihan, bagaimana kajian itu disusun, sistematika, penjelasan mengenai bukti, barang bukti, dan alat bukti, proses dan teknik klarifikasi dan analisa unsur-unsur tindak pidana, proses penyelesaian sengketa, semua dibahas lengkap dalam diskusi yang berlangsung online dan offline ini.

"Semua hal saat menyusun kajian, rekomendasi, dan putusan haruslah bisa dipertanggungjawabkan. Tidak akan ada masalah saat semua hal bisa dipertanggungjawabkan," tegas Sri Sugeng.

Diskusi berlangsung dari jam 09.30-12.30 juga dihadiri oleh perwakilan dari KPU Ngawi, Polres, Kejaksaan, Kesbangpol Ngawi. (\*)

“

Perlu diperhatikan, bahwa rekomendasi dan putusan itu menjadi objek diskusi publik setelah menjadi keputusan hukum. Sementara hari ini kita perlu diskusi untuk kesiapan pengawas pemilu menyongsong tahapan yang sebentar lagi akan dilakukan ”

- Purnomo Satriyo Pringgodigdo -  
Anggota Bawaslu Jawa Timur



# 11 Episode

## Divisi Penanganan Pelanggaran

Oleh : Ilham Bagus

Diskusi internal mingguan menjadi salah satu ciri khas Bawaslu Jatim. Dari 11 tema yang direncanakan, divisi Penanganan Pelanggaran memulainya dengan membentuk Investigasi/Penelusuran Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pilkada, pada Kamis (19/05/2022) secara daring.



Anggota Bawaslu Jatim, Muh Ikhwanudin Alfianto menuturkan bahwa diskusi dari divisi yang dipimpinnya memang sengaja dilakukan jelang dimulainya tahapan pada 14 Juni 2022. "Ibarat sepeda motor, sebelum berangkat di pagi hari kita perlu panaskan dulu agar motornya bisa berjalan lancar dan cepat. Diskusi kali ini sebagai pemanasan sebelum nantinya masuk tahapan Pemilu dan Bawaslu melakukan pengawasan" ungkapnya.

Menurut Ikhwan, dalam pemilu dan pilkada terdapat perbedaan diksi dalam menangani dugaan pelanggaran. "Dalam Pemilu kita menggunakan istilah investigasi sementara dalam Pilkada dengan istilah penelusuran," tambahnya.

Mengaca pada pengalaman Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, cara menangani dugaan pelanggaran dalam tahap Investigasi-penelusuran akan menentukan proses selanjutnya dan juga ada resiko bagi pengawas pemilu jika tidak tepat dalam melakukan investigasi-penelusuran ini.

"Pengalaman kita saat Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 cara menangani dugaan pelanggaran yang kurang tepat akan berdampak pada kita. Misalnya ada Pengawas yang diancam akan dilaporkan ke Polisi dan ke DKPP. Untuk itulah, diskusi tentang tema ini penting perlu dilakukan" jelasnya.

Hingga berita ini ditulis, divisi penanganan pelanggaran se-Jatim telah menyelesaikan kajian tentang Investigasi/Penelusuran Dugaan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan, Penerimaan Aduan/Laporan dan Registrasi Dugaan Pelanggaran pada Pemilu/Pemilihan, Klarifikasi Dugaan Pelanggaran, Penyusunan Kajian Dugaan Pelanggaran pada Pemilu/Pemilihan, dan Pembuktian Dugaan Pelanggaran pada Pemilu/Pemilihan.

## **BAWASLU JATIM LAKUKAN PENGAWASAN MELEKAT PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

*Oleh : Juwani*

Pengawasan terhadap pemutahiran data pemilih berkelanjutan ( PDB) sebagaimana amanah Undang-undang 7 tahun 2017 Pasal 104 huruf (e), dilaksanakan oleh Bawaslu dengan kordinasi melekat pada Komisi Pemilihan Umum setiap tingkatan. Tiap bulan melakukan uji petik atas komponen data pemilih yang mengalami perubahan. Dari uji petik tersebut menjadi bahan masukan kepada KPU di tiap tingkatan.

Dengan membangun sinergi pada stakeholder, baik kepada dinas penduduk dan pencatatan sipil (dispendukcapil) pemerintah kecamatan, desa, kementerian agama, TNI/Polri maupun yang lain harapannya input data penduduk yang update secara administrasi bisa terus terlaksana. Baik itu pemilih yang pindah domisili, meninggal, purna dari TNI/Polri, dan lain-lain diupdate untuk dimutakhirkan pada PDB. Dikonfirmasi kepada Aang Kunaifi dalam rangka PDB, Bawaslu Jatim selalu melakukan evaluasi bertahap

dari jajaran di bawahnya. Saling memberi masukan dan update terhadap informasi, kebijakan maupun kendala di lapangan.

Sementara itu, KPU sendiri memutuskan untuk update PDB dengan melibatkan stakeholder secara tatap muka 3 bulan sekali. Selebihnya masukan maupun informasi tentang PDB diinformasikan melalui surat dikirim ke masing-masing instansi termasuk Bawaslu.

Hasil pemutahiran Bulan Mei dari 38 Kab/Kota se-Jatim tercatat hasil pengawasan PDB per bulan Mei 2022 terdapat total 666 Kecamatan, 8497 Desa. Dan TPS sejumlah 120.674. Sementara jumlah PDB sebelumnya terdiri dari Laki-laki 14.418.551 Perempuan 14.863.866 total 29.282.417. sementara di Bulan Mei 2022 menjadi Laki-laki 14.445.206 dan Perempuan 14.838.341 dengan total 29.283.547

**RAPAT EVALUASI**  
**PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN**  
**TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2022**  
**DI PROVINSI JAWA TIMUR**



## CAK HADI MARGO TIDAK PERGI HANYA PAMIT

Oleh : Buyung Pambudi



Jawa Timur – Satu lagi kabar duka datang dari Bawaslu Kota Surabaya. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surabaya, Hadi Margo Sambodo meninggal dunia pada Kamis (12/5/2022). Sebelumnya, Yaqub Baliyya Al Arif telah berpulang mendahului kita semua saat pandemi Covid-19 berada pada Kamis tahun lalu (11/2/2021). Keduanya merupakan anggota Bawaslu Kota Surabaya.

Yaqub Baliyya Al Arif, sosok jenaka itu telah berpulang lebih dahulu. Kini, setahun berselang, Cak Hadi Margo juga berpulang. Cak Hadi Margo merupakan representasi 'Arek Suroboyo' yang paripurna. Bagaimana tidak? Penampilan dan nada bicara yang khas Surabaya selalu menempel pada diri almarhum. Sebagai sesama Kordinatoor Divisi Penyelesaian Sengketa, Cak Hadi Margo selalu

punya cara untuk berbagi cerita lucu khas Surabaya di sela-sela rehat rapat Divisi Penyelesaian Sengketa.

Tugas berat tidak menghalangi Cak Hadi Margo untuk menebar senyum ketika bertemu sahabat-sahabat Bawaslu. Tugas komisioner Bawaslu Kota Surabaya memang tidak pernah ringan mengingat tempat tugasnya yang memang berada di 'jantung' Jawa Timur. Sejak tahun 2019, di semua gelaran pemilu maupun pemilihan, Bawaslu Kota Surabaya tidak pernah absen menerima permohonan penyelesaian sengketa proses.

Ditambah lagi beberapa kali harus mengikuti sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kota Surabaya sebagai pusat gelaran demokrasi, membuat warganya memiliki daya awas dan kritik yang kuat, sehingga beberapa kali komisioner Bawaslu Kota Surabaya dilaporkan ke DKPP. Namun, sebagai penegak hukum pemilu, lembaga Bawaslu melihat upaya pelaporan ke DKPP juga sebagai perwujudan hak-hak publik yang memang dilindungi oleh undang-undang.

Cak Hadi Margo telah mendahului kita semua. Selamat jalan, selamat berjumpa dengan sahabat-sahabatmu Cak Yaqub Baliyya, Mas Hasyim, dan Mas Abdjudin. Cak Hadi Margo dan sahabat-sahabat Bawaslu tidak pergi meninggalkan kita, mereka hanya pamit untuk bertemu dengan sahabat lain di sana, dalam keabadian.



# BAWASLU JATIM



Pasca libur Idul Fitri tahun 2022, Bawaslu Jatim selenggarakan halalbihalal, Senin (09/05/2022). Selain saling memaafkan antar komisioner dan pegawai, saat itu juga diisi dengan arahan dari Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Totok Hariyono.

Saat Halalbihalal, Totok mengingatkan tentang pentingnya disiplin bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung tugas dan kewenangan pengawas pemilu.

"Aparatur Sipil Negara (ASN) ini dibayar oleh negara. Dari sekarang hingga meninggal. Apa yang Anda makan dan minum itu semuanya dipertanggungjawabkan. ASN harus disiplin dalam bekerja," ungkapnya.

Totok kembali menekankan posisi ASN di Bawaslu.

"Untuk melancarkan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu dibentuk Kesekjenan dan Sekretariat. Jangan di balik. Siapa Pengawas Pemilu? Ketua dan Anggota Bawaslu," jelasnya.

Untuk itulah, Totok mengajak untuk saling kritik dan mengingatkan sesuai dengan peraturan.

"Ayo kita mulai mengisi reformasi ini. Saling terbuka dalam kritik. Kita manfaatkan betul apa wewenang kita sebaik-baiknya sebagai pertanggung jawaban di hadapan Tuhan," pungkasnya.



---

“Perkaya imajimu dengan terus mencoba  
sesuatu yang baru dalam hidupmu,”

- Taufiqil Aziz

---

**BULETIN**  
**DEMI PEMILU**